



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

# KONSEP KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ISTERI (Studi Isteri Yang Menanggung Nafkah Keluarga)

## TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam  
pada Program Studi Perdata Islam  
Konsentrasi Hukum Perdata Islam



Disusun Oleh :

**ASEP FAUZI FIRMANSYAH**  
NIM. 505940004

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI  
CIREBON  
2011**



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Diarangi mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## ABSTRAKSI

**ASEP FAUZI F:** *“Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Warisan Terhadap Isteri (Studi Isteri Yang Menanggung Nafkah Keluarga)”*

Perkembangan dunia yang telah mengalami perubahan, setiap manusia dituntut untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Tidak terkecuali dalam hukum waris Islam dalam pelaksanaannya harus dapat pula menyesuaikan perkembangan dan nilai-nilai sosial. Perkembangan nilai-nilai sosial akan membuat perubahan terhadap nilai yang ada. Nilai-nilai yang dahulu diyakini sebagai kebenaran kini telah mengalami pergeseran nilai. Yang dahulu hukum yang dianggap sebagai pedoman yang bersifat sakral dan final kini telah mengalami pergeseran nilai pula. Nilai-nilai keadilan menurut hukum waris Islam kini pula mengalami pergeseran nilai. Dengan semakin merekannya isu gender ini pula yang membuat tatanan hukum keawrisan Islam mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan mendasar ini terlihat dari hukum waris Islam yang dikenal dengan hukum faraid telah mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan pada zaman sekarang menuntut penyesuaian antara hak lakilaki dan perempuan. Perempuan sebagai makhluk yang mempunyai kewajiban yang sama. Sudah sepantasnya menuntut hak yang sama pula.

Penelitian ini adalah bertolak dari permasalahan bagaimana aspek hukum wanita bekerja menurut hukum Islam?, bagaimana keadilan hukum waris dalam Islam?, dan bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum wanita bekerja menurut hukum Islam, untuk mengetahui keadilan hukum waris dalam Islam, dan untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library research*). Kajian pustaka berusaha mengungkapkan konsep keadilan dalam pembagian harta warisan terhadap isteri yang menanggung beban ekonomi keluarga dengan cara membaca dan mencatat informasi yang relevan dengan kebutuhan bahan bacaan mencakup buku-buku teks jurnal atau majalah-majalah ilmiah dan hasil penelitian.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Pembagian warisan harta bersama pada wanita bekerja untuk menghidupi ekonomi keluarga sering dirasakan tidak adil oleh pihak wanita. Hal ini disebabkan harta milik wanita tersebut diikutsertakan dalam pembagian harta warisan. Proses pembagian harta warisan dalam keluarga kurang memandang harta kepemilikan wanita yang bekerja yang diperoleh dari hasil jerih payahnya selama bekerja. Pada pembagian harta warisan keluarga terutama pada keluarga yang isteri ikut bekerja untuk menghidupi beban keluarga menjadi polemik yang sering terjadi. Pembagian warisan tidak melihat status kepemilikan harta yang ada sehingga sering terjadi harta milik isteri ikut terbagi dalam pembagian tersebut. Hal ini disebabkan tidak jelasnya status kepemilikan harta yang dibagi.



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Diarangi mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## ABSTRACT

**ASEP FAUZI F:** *"The concept of Justice in the Division of Heritage Assets Against Wife (Wife Study Livelihoods The Bear Family)"*

World has changed, every human being is required to adjust the times. Not excuale in Islamic inheritance law in its implementation must be able to also adjust the development and social values. The development of social values will make changes to the existing value. The values previously believed as the truth has now shifted value. The first law to be considered as guidelines that are sacred and the final value has now shifted as well. Values of justice according to Islamic inheritance laws are now also experiencing a shift in values tela. With the growing gender issues is also what makes the legal order of Islamic keawrisan fairly fundamental change. Fundamental changes can be seen from the Islamic inheritance law, known as the law has undergone faraid adjustments to the values of justice. Values of justice in today's demanding adjustment between male and female rights. Women as creatures who have the same Rightly demanding the same rights.

This study is the opposite of the problem How the Legal Aspects of Working Women According to Islamic Law?, How Justice in Islamic Inheritance Law?, And How the Position of Women in the system of inheritance?

The purpose of this study is to Know Legal Aspects of Working Women According to Islamic Law, Inheritance Law To Know Justice in Islam, and To Know the Status of Women in Inheritance Systems.

The research was conducted using qualitative methods of research is a form of literature review (*library research*). Literature review trying to express his concept of Justice in the Division of Heritage Assets Against Wife Who Bear the Burden of Economic Families with how to read and record information relevant to the needs of reading materials include textbooks, journals or magazines Ilmiah and research results.

From the results of research that has been done, the division of joint property inheritance for women to work to support the family economy is often perceived as unfair by the female. This is due to the woman's property included in the distribution of the estate. The process of division of inheritance in the family property ownership less regard women who work derived from the results of his labors during the work. In the division of inheritance the family, especially to families whose wives go to work to support his family loads into a polemic that often occur. The division of inheritance do not see the status of ownership of existing assets so often the case involved the wife's property was divided in the division. This is due to the unclear status of a shared ownership property.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul: *“Konsep Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan Terhadap Isteri (Studi Isteri yang Menanggung Nafkah Keluarga)”*. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Maksum Mukhtar, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati (Institut Agama Islam Negeri) Cirebon
2. Bapak Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag, Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. H. Attabik Lutfi, MA., Ketua Program Studi Hukum dan Peradilan Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Prof. Dr. H. Maksum Mukhtar, M.Ag, Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Dr. H. Attabik Luthfi, MA., Dosen Pembimbing II.
6. Civitas Akademika Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Rekan rekan seperjuangan Hukum Perdata Islam angkatan 2009 : Aa Samud “My Hero”, Jeung Afaz “Trio Komodo”, My Brother “Ibnu”, Pa





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Syahidin”Si statcment Perfyume”, Kang yai Zizi, Kang Lebe Kholik, Nyai Naili, dan Neng Shina “The Warrior Princess”.Terima Kasih atas Kebersamaan serta Kekompakannya selama ini.Semoga Silaturahmi serta persaudaraan qta senantiasa terjaga.Amiin...

8. My Little Family; My Wife “Nia El Hadi”, My Son “Rezvan Riyadh Rizqullah”, My Daughter “Rania Khanza Nailatussyifa”.Terima kasih atas cinta, kasih sayang serta perhatiannya selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, walau dengan segala daya dan upaya yang telah penulis ushakan semaksimal mungkin, namun segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis sangat berterimakasih dan terbuka untuk menerima saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan tesis ini.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, semoga amal baik bapak/ibu/saudara/I yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Cirebon, 22 Juni 2011

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

**أسيف فوزي :** "مفهوم العدل في شعبة التراث (دراسة سبل العيش عند الزوجة العاملة والناقصة لأسرتها)"

العالم قد تغير، مطلوب من كل إنسان لضبط الأوقات. يجب ألا في قانون الإرث الإسلامي في تنفيذها أن تكون قادرة على ضبط أيضا القيم الاجتماعية والتنمية. وتنمية القيم الاجتماعية إجراء تغييرات على القيمة الحالية. تحول القيم يعتد سابقا الحقيقة الآن القيمة. وقد تحول أول قانون لا اعتبار المبادئ التوجيهية التي تعتبر مقدسة والقيمة النهائية كما هو الحال الآن أيضا. قيم العدالة وفقا للقوانين الميراث الإسلامية هي الآن تواجه أيضا تحولا في النسيجة القيم. مع تزايد قضايا الجنسين هو أيضا ما يجعل من النظام القانوني للتغيير الإسلامية الأساسية إلى حد ما. ويمكن رؤية التغييرات الأساسية من قانون الميراث الإسلامي، والمعروفة باسم القانون خضع لتعديلات قيم العدالة. قيم العدالة في التكيف اليوم مطالبين بين حقوق الرجال والنساء. النساء كمخلوقات الذين لديهم نفس. يطالبون بحق نفس

هذه الدراسة هي عكس مشكلة كيف الجوانب القانونية للمرأة العاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية؟ ، كيف العدالة في قانون الإرث الإسلامي؟ ، وكيف أن مكانة المرأة نظام الميراث؟

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة الجوانب القانونية للمرأة العاملة وفقا للشريعة الإسلامية والقانون الوراثة لمعرفة العدل في الإسلام، ومعرفة وضع المرأة في أنظمة

أجري البحث باستخدام طرق البحث النوعي هو شكل من أشكال الاستعراض (مراجعة الأدبيات تحاول التعبير عن مفهومه للعدالة في شعبة التراث الأصول ضد الزوجة التي تتحمل العبء الاقتصادي للأسرة مع كيفية قراءة وتسجيل المعلومات ذات الصلة لتلبية احتياجات مواد للقراءة وتشمل الكتب والدوريات أو

بحوث التي تم القيام به، وتقسيم الميراث المشترك للمرأة للعمل على دعم وكثيرا ما ينظر للاقتصاد الأسرة باعتبارها غير عادلة من جانب الإناث. هذا ومن المقرر أن ممتلكات المرأة مدرجة في توزيع التركة. عملية تقسيم الميراث في العائلة الملكية أقل النساء الذين يعملون الصدد مستمدة من نتائج أعماله خلال العمل. في تقسيم الميراث والأسرة، وخصوصا للعائلات التي زوجات انتقل إلى العمل لإعالة أسرته الأحمال في جدل التي تحدث في كثير من الأحيان. تقسيم الميراث لا نرى حالة من ملكية الأصول الموجودة في كثير من الأحيان تنطوي على حالة تم تقسيم ممتلكات الزوجة في تقسيم. هذا ومن المقرر أن الوضع غير واضح للعقار ملكية مشتركة.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia dalam perjalanan hidupnya akan melewati suatu masa, dilahirkan, hidup di dunia dan meninggal dunia. Masa-masa tersebut tidak terlepas dari kedudukan kita sebagai makhluk Tuhan, karena dari Dia-lah kita berasal dan suatu saat kita akan kembali berada di pangkuanNya. Selain sebagai makhluk individu manusia juga berkedudukan sebagai makhluk sosial bagian dari suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya.

Berbicara mengenai perjalanan hidup manusia, ketika manusia melewati masa-masa hidup di dunia, ia juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat tersebut. Ketika manusia itu meninggal dunia maka hak-hak dan kewajibannya akan berpindah kepada keturunannya, hal ini dapat diartikan adanya macam-macam hubungan hukum antara anggota masyarakat yang erat sifatnya,<sup>1</sup> namun dengan adanya peristiwa meninggalnya seseorang tidak berakibat hilangnya perhubungan-perhubungan tadi, karena hukum telah mengatur bagaimana cara perhubungan itu dapat diselamatkan agar masyarakat selamat sesuai dengan tujuan dengan hukum yang mengaturnya

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hlm. 18



dari kepentingan-kepentingan yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa itu. Membagi dan memperoleh bagian dari harta peninggalan seseorang karena kematian ini ketentuannya diatur dalam hukum waris.<sup>2</sup>

Dari uraian tersebut, maka timbul apa yang dinamakan warisan. Berbicara mengenai warisan maka menyangkut 3 unsur warisan yaitu :

1. Adanya pewaris atau orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang akan mengalihkan.
2. Adanya muwaris atau ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu yang terdiri dari ahli waris dan yang bukan ahli waris.
3. Adanya mauruts atau harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan.

Menurut hukum Islam dalam surat An-Nisa 12 yang menentukan bagian istri menjadi 2 macam, yaitu :

- a. Satu perdelapan ( $1/8$ ) harta warisan apabila mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak mewaris. Yang dimaksud anak termasuk juga cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki. Anak atau cucu yang diperoleh baik dari istri yang ditinggalkan maupun dari istri yang terdahulu.
- b. Satu perempat ( $1/4$ ) harta warisan bila tidak ada anak atau istri seperti tersebut diatas.

Norma hukum di dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman:

---

<sup>2</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Mandar Maju, 2002), hlm. 112



وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.(Q.S. An-Nissa: 12)

Ayat diatas menjelaskan yang menentukan bagian ahli waris istri mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya. Dilihat secara sepintas, kalau dikaitkan dengan istri





yang ikut serta bekerja mencari penghasilan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil. Tetapi kalau dikaji secara mendalam dan menyeluruh dalam satu sistem keluarga Islam, yaitu hukum waris yang merupakan bagian dari hukum keluarga dan tidak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan, maka keadilan justru akan terlihat karena ketentuan

Perolehan warisan istri mendapat seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ) bagian yang diterimanya tersebut dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang menentukan kewajiban seorang pria sebagai suami untuk menanggung beban ekonomi di dalam keluarga. Sedangkan wanita sebagai istri tidak mempunyai kewajiban yang demikian.

Allah swt berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (untuk membiayai kehidupan keluarganya)”.*<sup>3</sup> (Q.S An-Nissa: 34)

Sesuai dengan ketentuan didalam Al-Qur'an tersebut dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hamzah Aszaqasi disebutkan (artinya) sebagai berikut :

*Dan diwajibkan kepada kamu (pria) untuk memberi makan dan*

<sup>3</sup> Q.S An-Nissa: 34



*pakaian kepada mereka (wanita) secara baik.*<sup>4</sup>

Oleh karena kemampuan seseorang dalam memberi nafkah tidak sama, maka didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan (Pasal 34 ayat 1).

Keperluan hidup berumah tangga tersebut oleh komplikasi hukum Islam Pasal 20 ayat (4) disebutkan secara agak rinci yaitu meliputi :

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Demikianlah, menurut hukum Islam seluruh beban ekonomi keluarga diletakkan di atas pundak pria sebagai suatu kewajiban hukum. Kecuali istri memang secara sukarela membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut. Namun pembebasan ini hanya berlaku terhadap istri sendiri dan tidak berlaku bagi anak-anaknya. Demikian kompilasi hukum Islam Pasal 80 ayat (6) menjelaskan.

Sedangkan wanita hanya berkewajiban mengatur untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Hal ini ditegaskan di dalam Hadist, bahwa Rasulullah bersabda kepada Hind, istri Abi Sufyan yang terjemahannya (kurang lebih) sebagai berikut:

*Terimalah uang dari suamimu secukupnya untuk dirimu dan anakanakmu*

<sup>4</sup> Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islamy (Al-Baitul Islamy)*, Terjemahan SA Zemol, (Solo: Pustaka Mantiq), hlm. 101.



*secara baik.*<sup>5</sup>

Kewajiban istri untuk mengatur rumah tangga dan juga ditegaskan di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat (2) dan kompilasi hukum Islam Pasal 83 ayat (2). Dinyatakan bahwa istri wajib menyelenggarakan dan mengatur kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya.

Oleh karena ketentuan di dalam hukum perkawinan itu harus dipandang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga sebagai satu sistem. Maka norma hukum kewarisan Islam yang menentukan bagian warisan wanita mendapat seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ) bagian yang diterimanya, merupakan ketentuan yang adil, sesuai hak dan kewajibannya yang diberikan oleh hukum.

Dihubungkan dengan masalah ini bahwa hukum Islam tidak dapat dipandang dari satu segi saja secara terpisah, tetapi harus dilihat dari satu sisi Islam secara keseluruhan. Apabila suatu unit tidak berjalan maka akan mempengaruhi unit lain, karena masing-masing unit saling menopang untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia, yang hendak dicapai oleh sistem hukum Islam secara keseluruhan.

Yang menjadi masalah adalah apabila dalam suatu sistem unit-unit yang ada tidak bekerja menurut sifatnya. Gejala ini nampak di dalam kehidupan keluarga muslim. Menurut sistim hukum kekeluargaan Islam yang secara positif berlaku baginya, beban dan tanggung jawab ekonomi di dalam

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 102.





keluarga dipikul oleh kaum pria saja, sebagai suatu kewajiban hukum. Sedangkan wanita mempunyai hak dari suaminya. Tetapi gejala sosial ini tidak selalu demikian.

Dinamika hukum Islam terbentuk oleh interaksi antara wahyu dengan rasio. Kombinasi dua paradigma di ataslah yang mendorong berkembangnya tradisi ijtihad. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam terdapat dua aliran yang besar diantara para pendiri madzhab. Madzhab pertama adalah yang dikenal dengan *al Royu* (yaitu madzhab yang mengedepankan rasio sebagai panglima dalam memahami al-Qur'an), sedangkan madzhab yang kedua adalah *al-Hadits* yaitu (mereka yang mengedepankan Hadis Dalam Memahami al-Qur'an) yaitu kelompok yang mempertahankan idealitas wahyu tanpa adanya pemikiran rasional.<sup>6</sup> Pemahaman yang tidak proporsional dalam memandang hukum Islam tersebut misalnya yang dipahami hanya fikih saja, maka kesan yang akan diperoleh adalah hukum Islam mengalami stagnasi atau jumud dan tidak memiliki kesanggupan untuk menjawab tantangan zaman.

Suatu kenyataan menunjukkan bahwa para wanita sebagai istri banyak memasuki sektor lapangan kerja di luar rumah, kecenderungan demikian selalu menampakkan dirinya di dalam masyarakat di Indonesia. Para wanita banyak mempunyai peranan dalam menanggung beban ekonomi keluarga. Para wanita tidak hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga semata-mata, yang hanya disibukkan dengan urusan mengatur jalannya kehidupan

<sup>6</sup> Qurtubi Al Sumanto, *Era baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin 1999), hlm. 5



keluarga, tetapi juga ikut bekerja mencari uang, hal ini dilakukan bukan hanya untuk dimiliki atau untuk kepentingan sendiri secara pribadi, tetapi untuk kepentingan seluruh anggota keluarganya.

Berdasarkan pada kenyataan yang terjadi di zaman sekarang penulis mendapatkan data yang menunjukkan bahwa wanita sebagai istri banyak memasuki sektor lapangan kerja diluar rumah baik sebagai karyawan perusahaan, pegawai negeri, pedagang maupun buruh. Semua ini menunjukkan adanya aktivitas wanita dalam keikutsertaannya menanggung kebutuhan ekonomi keluarga.

Dengan demikian beban ekonomi keluarga tidak hanya dipikul oleh pria saja seperti yang diwajibkan oleh Al-Qur'an dan Hadits, tetapi wanita juga ikut menanggungnya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, wanitalah yang menanggung beban ekonomi keluarga, sedangkan pria mengurus jalannya kehidupan keluarga dirumah.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian tesis ini adalah konsep keadilan dalam pembagian harta warisan terhadap isteri (studi isteri yang menanggung nafkah keluarga).

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif.



### c. Jenis Masalah

Jenis masalah tesis ini adalah tentang fiqh mawaris, dimana penulis ingin mengetahui konsep keadilan dalam pembagian harta warisan terhadap isteri (Studi Isteri Yang Menanggung Nafkah Keluarga).

### 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dibuat untuk memfokuskan masalah penelitian yang akan dikaji dalam tesis ini, sebagai berikut:

- a. Hukum Islam sebagai produk kerja intelektual, perlu dipahami tidak sebatas pada fikih. Persepsi yang tidak proporsional dalam memandang eksistensi sering melahirkan persepsi yang keliru dalam memandang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam hukum Islam. Gerakan pembaharuan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya baik yang bersifat individual maupun secara kelompok pada kurun dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan dalam persepsi dan praktek yang telah mapan kepada pemahaman yang baru. Pembaharuan yang bertitik tolak dari asumsi atau pandangan yang jelas dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan sosial, bahwa hukum Islam sebagai realitas dan lingkungan tertentu tersebut tidak sesuai bahkan menyimpang dengan Islam yang sebenarnya.
- b. Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi, fungsi pertama sebagai kontrol sosial yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan yang selain sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas



Masyarakat. Sedang kontrol yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Sehingga dalam konteks ini hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

### 3. Pertanyaan Penelitian

Tesis ini mengangkat permasalahan konsep keadilan dalam pembagian harta warisan terhadap isteri yang menanggung nafkah keluarga. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

- a. Bagaimana aspek hukum wanita bekerja menurut hukum Islam?
- b. Bagaimana keadilan hukum waris dalam Islam?
- c. Bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

Penelitian tesis ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui aspek hukum wanita bekerja menurut hukum Islam?
- b. Untuk mengetahui keadilan hukum waris dalam Islam?
- c. Untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan?

### 2. Manfaat

#### 1. Memberikan sumbangan secara teoritis bagi:

- a. Ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum kewarisan Islam yang





menentukan bagian warisan istri mendapat seperempat ( $1/4$ ) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan ( $1/8$ ) bagian yang diterimanya bagian pria di tengah-tengah emansipasi wanita di dalam masyarakat.

b. Pembentuk Undang-undang dalam menentukan bagian warisan bagi masyarakat muslim di tengah-tengah peranan wanita yang terus mengalami perkembangan.

2. Memberikan sumbangan bagi para praktisi, yaitu para Ulama, hakim pengadilan agama, notaris, penasehat hukum atau advokat khususnya, maupun umat Islam pada umumnya dalam menghadapi kasus-kasus kewarisan.

#### D. Tinjauan Pustaka

Untuk menemukan jawaban atas masalah yang diajukan, penulis meneliti konsep keadilan dalam pembagian harta warisan terhadap isteri (studi isteri yang menanggung nafkah keluarga).

Buku yang berjudul “*fiqh Mawaris*” karya Ahmad Rofik yang menitik beratkan kajiannya pada ilmu pembagian harta warisan untuk mempermudah dalam permasalahan warisan yang terjadi di masyarakat umumnya.

Dalam tesisnya Nur Azizah yang berjudul: *Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Untuk Isteri Yang Ikut Bekerja*



*Menanggung Beban Ekonomi Keluarga.* Hingga saat ini tulisan-tulisan mengenai permasalahan konsep keadilan pembagian warisan Islam memang banyak dijumpai. Namun, tulisan-tulisan tersebut secara umum bukanlah merupakan suatu penelitian mengenai permasalahan pembagian harta warisan, melainkan lebih banyak membahas persoalan keadilan isteri yang menanggung nafkah keluarga dari sisi lain.

#### E. Kerangka Pemikiran

Islam datang membawa panji keadilan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang yang tua renta, suami, isteri saudara laki-laki dan saudara perempuan sesuai tingkatan masing-masing. Dari berbagai ketentuan dalam hukum kewarisan Islam, setidaknya ada lima azas (doktrin) yang disepakati sebagai sesuatu yang dianggap menyifati hukum kewarisan Islam, yaitu bersifat *Ijbari*, bilateral, individual, keadilan yang berimbang dan akibat kematian.<sup>7</sup>

Tuhan menciptakan manusia di dunia ini berpasang-pasangan artinya bahwa manusia pada suatu saat nanti pasti mempunyai keinginan untuk melakukan perkawinan. Perkawinan ini bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang nantinya akan meneruskan keturunannya.

Dalam kehidupan berkeluarga antara suami isteri diuntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghargai dan saling

<sup>7</sup> Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 6.



memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>8</sup>

Peristiwa pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, dilakukan dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Tetapi ada juga pewarisan berdasarkan surat wasiat, hal ini disebabkan karena adanya pemikiran bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada hakekatnya merupakan hasil kerjanya selama hidup, maka dari itu wajarlah apabila dia akan memberikan sebagian harta warisannya kepada keluarganya atau seseorang yang disukai misalnya kepada sahabat dekatnya atau kepada orang yang dipercayainya.<sup>9</sup>

Sudah merupakan suatu hal yang tidak disangkal lagi bahwa setiap manusia yang mengalami peristiwa kelahiran pasti mengalami kematian. Dimana setiap peristiwa kelahiran dan kematian pasti menimbulkan akibat hukum, tidak terkecuali dalam peristiwa kematian. Menyangkut masalah kematian ini seringkali menimbulkan permasalahan hukum terutama yang berkaitan dengan harta si orang yang meninggal dunia atau pewaris. Karena dengan meninggalnya seseorang itu maka secara spontan segala hak dan kewajiban beralih kepada orang yang ditinggalkannya, yang berhak atas harta kekayaan tersebut.

Sebenarnya yang dimaksud hukum waris menurut hukum adat pada dasarnya merupakan sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Mg. Sri Wiyarti. *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bagian B. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000), hlm. 3.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 273.

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 327.



Pembagian warisan harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak yang tidak sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Asas keadilan atau keseimbangan disini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Dalam hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris harus berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, yakni mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya menurut kemampuannya,<sup>11</sup>

Tanggung jawab perempuan dan laki-laki sangat berbeda, tanggung jawab perempuan tidak seberat tanggung jawab laki-laki terhadap keluarganya. Perempuan justru harus menerima infaq, tempat tinggal, dan nafkah lainnya dari suaminya.

Dapatkah dipahami rasa keadilan hukum Islam dalam kewarisan dimana bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan itu didasarkan atas perbedaan tanggung jawab yang hakikatnya masing-masing sama dari perbedaan

<sup>11</sup> Jufaaaya S. Praja, *Filsafat hukum islam*, (Bandung : Pusat Penerbitan Universitas LPPM, Unrversitas Islam Bandung, 1995) hlm.107-111





pembagian tersebut.<sup>12</sup>

Pada kenyataan sekarang posisi laki-laki sebagai pencari nafkah untuk isterinya tidak lagi sejalan dengan aturan yang belaku, sebaliknya keadaan perempuan saat ini tidak lagi pada kodratnya yang hanya mengurus keluarganya. Bahkan untuk konteks zaman sekarang tugas perempuan sudah sama seperti laki-laki yang harus mencari nafkah untuk keluarganya.

Sedangkan seorang suami enak-enakan di rumah tanpa berpikir akibat yang terjadi pada isterinya selamat atau tidak bekerja di luar rumah, bahkan demi untuk mencukupi keluarganya isteri berani bekerja keluar negeri yang semestinya itu semua tanggung jawab suami.

## F. Metode Penelitian

### 1. Bentuk dan Sifat Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library research*). Kajian pustaka berusaha mengungkapkan konsep keadilan dalam pembagian harta warisan terhadap isteri yang menanggung nafkah keluarga dengan cara membaca dan mencatat informasi yang relevan dengan kebutuhan bahan bacaan mencakup buku-buku teks jurnal atau majalah-majalah ilmiah dan hasil-hasil penelitian.

Penelitian ini bersifat kualitatif karena uraian-uraian datangnya bersifat penelitian menekankan proses menganalisa data secara induktif dan rancangan bersifat sementara.

<sup>12</sup> Munawir sjadjali, dkk, *Polmik Rektualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Punjimas, 1988), hlm: 125



## 2. Pendekatan Tahapan-Tahapan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analisis*) yang bersifat penafsiran (*hermenetik*). Analisis ini merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah pembahasan dan pemahaman materi tesis ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab dan dari beberapa dirinci menjadi beberapa sub bab.

**BAB I : PENDAHULUAN**, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : WANITA BEKERJA MENURUT HUKUM ISLAM**, yang terdiri dari: Pandangan Umum Tentang Gender, Status Hukum Harta Dari Wanita Bekerja, dan Wanita Bekerja Menurut Hukum Islam.

**BAB III : KEADILAN ISLAM DALAM HUKUM WARIS DALAM ISLAM**, yang terdiri dari: Kewarisan dalam Islam, Keadilan Dalam Hukum Islam, Landasan Teoritis, dan Kerangka Konseptual.

**BAB IV : LANDASAN KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM WARISAN**, yang terdiri dari: Pembaharuan Terhadap Konsep Harta

Bersama Dalam Sistem Kewarisan Islam, Pembagian Warisan Untuk Wanita Bekerja dan Kendala-kendala dan Solusinya Dalam Pembagian Warisan Untuk Isteri yang Menghidupi Beban Ekonomi Keluarga.

**BAB V : PENUTUP**, yang terdiri dari, Kesimpulan dan Saran-saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Diarangi mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Taufik Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung Mizan 1994
- Ali DM Hukum *Islam Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo 1999
- Alkostar Artijo, *M Sholeh Amin, Pembangunan Hukum dalam Persepektif Politik Hukum*, Jakarta. Rajawali Perss , 1986
- Atan Andre Ulan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rowls* Yogyakarta, Kanisius 2001
- Aristoteles, *The Ethics of Aristoteles*, Dalam S Tasrif , Bunga Rampai Filsafat Hukum, Jakarta Abardin 1987
- Ashofa Burhan *Metode Penelitian Hukum*, Jakrta PT Rineka Cipta 2004
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam LingkunganAdat Minangkabau*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1992.
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997
- Asra Azumardi, *Akar-akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia Neo Sufisme Abad ke 11-12 dalam Tasawuf*, Jakarta Yayasan wakaf Paramadina 1996
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1977.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. I., Cet 4, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Ayumardi, Asra, *Akar-akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia*, Jakarta yayasan Wakaf Paramadina 1997
- Bacon Francis, *The Philosopy of Francis Bacon*, Liverpool, Liverpool University Press 1964
- Bayuni Al, *Memahami Hakikat Hukum Islam Studi Masalah Kontroversial*, Jakarta Firdaus 1997
- Djais Mochammad, *Fungsi Paradigma Dalam Perkembangan Ilmu dan Hukum*, Majalah Masalah-masalah Hukum edisi IV Januari-maret 1999 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang





1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Diarangi mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Donal Mack, *Development of Muslim Theology , Jurisprudence Theory*, Beirut khayat Oriental Reprint 1965

Elsia Brian, *The Masculine Umage of Scaine Howw Much Does Genser Reality Matter Harding Jan Perseptif On gender and Scaine*, Basingtoke Taylor and Francis ltd 1998

Ensiklopedy Indonesia 1984

Fatchur Rahaman, *Ilmu Waris* , Bandung PT Raja Grafindo Persada 1996  
George Rirzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Saduran Oleh Alimandan Jakarta, Rajawali Press 1992

Gede AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa , Bandung*, PT Citra Aditya Bhakti,2005

Ghofur Abdul Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* . Yogyakarta UII Press 2005

Hasniah Hasan, *Hukum Waris dalam Islam*, Surabaya, PT Bina Ilmu 1987

Haste Weinrich Heirlen, *Does Rationaly Overcone a Dualistic Word Vieww, Persepektiof On Gender and Scaince*, Bagistoke Taylaor and Francis Ltd 1986

Hadikusuma Hilman , *Hukum Pidana Adat* , Bandung, Alumni, 1979

Hanitijo Soemitro Ronny, *Persepektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Semarang, Agung Press 1998

-----, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta, Ghalia Indonesia 1988

Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius 1982

Hidayat Rachmad, *Feminisme dan Perlawanan Terhadap Teori Sosial Maskulin* , Yogyakarta, Jendela 2004

Heideh Moghisi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, Yogyakarta, LKIS 2004

Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty 1981

-----, *Asas-asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, Yogyakarta, Liberty 1982



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Diarangi mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- John Rowls, *A Theory Of Justice*, Cambrige Haward University Press 1971
- Kuhzari, H Ahmad, *Sistem Asobah Dasar Pemindahan Hak Milik Atas harta Peninggalan* ( Beirut, Dar Al-jail 1973
- Keller Evelyn Fpx *Women and Scaince: Two Kultures or One* Dalam International Jurnal Women Study
- Lexy J Moloeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya 1994
- Mansur Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,1999
- Magnis Frans Suseno, *Moralitas dan Nilai-nilai Komunitas, Debat Antara Komutarisme dan Universalisme Etis* . Majalah Filsafat Driyakara, Tahun XXI No 2 1995
- Majjid Khaduri, *The Islamik Conception Of Justice*, Baltimore and London The Jhons Hopkins University Press 1984
- Madjid Nurcholis, *Islam Kemanusiaan dan Kemodernan, Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*, Jakarta Yayasan Wakaf, Cetakan Ke 2 1992
- Mudzhar M Atho, *Figh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, Makalah Serie KKA 50 TH v/1991 Jakarta Yayasan Paramadina,1991
- Muslinudin, M, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta PT Tiara Wacana 1997
- Notohamijoyo, *Masalah Keadilan Hakikat dan Pengenaanya dalam Bidang Masyarakat Kebudayaan, Negara antar Negara*, Semarang, Tirta Amerta 1971
- Nasutian Harun, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta Bintang Cet 4 1986
- Nawawi, Arief Barda, Martini Hartadi, *Instrumen Penelitian*, Yogyakarta, University Press 1992
- Qurtubi Sumanto Al, *Era Baru Figh Indonesia*, Yogyakarta Cermin 1999
- Qodri Ahmad Azizi, *Memahami Hukum* , Wawasan 13 Januari 1990
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Aditya Bakti,1991



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Diarangi mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

-----, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung Alumni 1977

-----, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung Angkasa 1980

Rengka J Frans, *Dialog dan Keadilan dalam Proses Peradilan Pidana* Diponegoro University Press 2003

Rofig Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta Gama Media 2001

Rofig Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta Gama Media 2001

Santoso Herry, *Idiologi Patriarki dalam Ilmu-ilmu Sosial*, Yogyakarta, Proyek Penelitian PSW UGM 2001

Sarifuden Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2004

Sabiq S, *Fighus Sunnah* Darul Kitab Al- a'robby Jus 14 , Beirut Libanon 1996

Santoso Herry, *Idiologi Patriarki dalam Ilmu-ilmu Sosial*, Yogyakarta, Proyek Penelitian PSW UGM 2001

Su'udi, *Persamaan Hak antara Ahli waris laki-laki dengan Perempuan dalam Pembagian warisan di kecamatan Jupon Kabupaten Sidoarjo*, Surabaya Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 1983

Soekanto, *Masa Depan Hukum Adat di Indonesia*, Makalah Seminar Penelaahan Pembaharuan Hukum Nasional BPHN Jakarta, 2003

Syidie Rosalin, *A Natural Women, Culture Men A Feminist Persepektif on Sociology*, Ontorariu Methuen Publican 1987

Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat diKemudian hari*, Jakrta Pustaka Rakyat 1959

Suhardi, K Lubis, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta, Sinar Grafika Jakarta, 1997

Suparman Eman, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung Rajawali Press 2005

Sugiharto, *Bambang Post Modern Tantangan Bagi Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius 1996

Stratus Anselen, Juliet Cabin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur Teknik Teori Gronded*, Surabaya Bina Ilmu 1999



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta Kanisius 1991

Wacman Judi *Feminism Confort Technology* , Terjemahan Susilowaty, Yogyakarta SBP 1987

Wignyo Soebroto, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika masalahnya*, Jakarta, Elsam 2002

Wignyodipuro Surojo, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Bandung, Alumni 1973

Zahra, Abu Muhammad, *Ahkam Al Tirkat Wal –Mawaris* , Jakarta, Raja Grafindo persada 1987